IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269 TAHUN 2008 TENTANG REKAM MEDIS TERHADAP KLAIM BPJS DI RSUD SUNGAI DAREH

Robi Hidayat[1], Maiyestati [1], Zarfinal [1].
[1]Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : robihidayat82@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 menyatakan manfaat rekam medis merupakan dasar pembayaran biaya kesehatan. Kenyataannya pelaksanaan rekam medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh masih di temukan klaim pending. Permasalahan penelitian ini: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh? (3) Bagaimana upaya dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan: (1) Pelaksanaan rekam medis terhadap klaim BPJS telah berjalan namun belum maksimal (2) Salah satu kendala yang di temukan kurangnya tenaga rekam medis (3) Upaya yang dilakukan yaitu menempatkan tenaga instalasi rekam medis sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Kata kunci: Implementasi, Rekam medis, Klaim, BPJS, Rumah Sakit

UNIVERSITAS BUNG HATTA